

24Jam

Intervensi OPD, Banggar DPRD Sumbar Wanti-wanti TPSM

Afrizal - SUMBAR.24JAM.CO.ID

May 11, 2022 - 17:37



PADANG – Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menyorot tugas pokok dan fungsi Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) Pemerintah Provinsi (Pemprov). Unsur tersebut, dinilai terlalu memiliki intervensi dalam jalannya roda birokrasi di lingkungan OPD

Pemprov.

Anggota Banggar DPRD Sumbar Hidayat saat rapat pembahasan lanjutan arah kebijakan anggaran 2023 bersama TAPD Pemprov Sumbar, Selasa (10/5) mengatakan, Ketua Bappeda Sumbar Medi Iswandi pernah mengatakan salah satu fungsi TPSP membantu gubernur dan wakil dalam mengerjakan hal-hal teknis, namun hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Dasar hukumnya apa, kenapa TPSP diberikan kewenangan untuk membantu gubernur dalam hal-hal teknis. Ini menjadi pertanyaan bagi kita,” kata Hidayat yang juga ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar itu.

Bercermin dari pembentukan tim yang menyerupai TPSP di Ibu Kota Jakarta, mereka hanya sebatas memberikan masukan kepada gubernur, tidak bisa langsung dalam teknis pelaksanaan program kerja OPD. Di sisi lain honor tim yang dibentuk Anies di Jakarta diambil dari upah pungut gubernur.

“Pertanyaannya, TPSP Sumbar gajinya diambil dari mana apakah mereka bekerja sukarela untuk gubernur,” katanya.

Dia berharap keberadaan TPSP harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menjadi masalah dikemudian hari. Jangan aneh-aneh menjalankan pemerintah daerah, TPSP tidak hanya mengintervensi namun juga mengganggu jalannya roda birokrasi Pemprov.

Sementara itu Novrizon menurut informasi yang dia terima keberadaan TPSP telah memberikan tekanan terhadap OPD di lingkungan Pemprov Sumbar. Bahkan mereka masuk hingga persoalan internal OPD, bagaimana kedudukan mereka sebenarnya, tidak satu dua kepala OPD yang mengeluhkan hal itu.

Ini mesti dipertanyakan, di daerah lain ada tim serupa tapi tidak terkesan mengganggu. “Harus dijelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan tim yang beranggotakan sembilan orang ini,” katanya.

Dia mencontohkan pada rapat di Bappeda Sumbar beberapa waktu lalu, rapat itu yang memimpin adalah tim, itu sudah tidak benar, belum saat pertemuan di Hotel Balairung Jakarta salah satu dari mereka memaki dengan kasar pengelola hotel.

Sementara itu Sekertaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri mengungkapkan belum bisa menjelaskan secara rinci keberadaan tim ini, anggota TPSP memang di berikan SK oleh gubernur, namun dengan tugas yang mereka jalani masih belum diketahui dengan seksama.

Sejauh informasi yang diterima honor TPSP tidak dianggarkan, namun belum jelas hingga sekarang. (**)